

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan dilaksanakan mewujudkan kemakmuran masyarakat, melalui pengembangan perekonomian mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti jumlah penduduk kemiskinan. Selain pertumbuhan ekonomi, salah satu aspek penting untuk melihat kinerja pembangunan adalah seberapa efektif penggunaan sumber-sumber daya yang ada sehingga lapangan kerja dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi barang atau jasa yang dihasilkan meningkat. Dengan demikian diperlukan lapangan kerja diimbangi dengan tenaga kerja untuk memproduksi barang atau jasa tersebut sehingga pengangguran berkurang dan kemiskinan yang semakin menurun (Yacoub 2012).

Suatu negara dikatakan miskin biasanya ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita rendah, mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi (lebih dari 2 persen per tahun), sebagian besar tenaga kerja bergerak di sektor pertanian dan terbelenggu dalam lingkaran setan kemiskinan. Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat (Kunarjo 2002).

Masalah pokok kebijaksanaan makro ekonomi adalah mencapai secara serentak kestabilan harga serta kesempatan kerja yang tinggi. *Kurva phillips* dapat menjelaskan bahwa kestabilan harga dan kesempatan kerja yang tinggi

adalah dua hal yang tidak bisa terjadi bersama-sama. Kalau menghendaki kesempatan kerja yang tinggi harus mau menanggung beban inflasi, jadi dua-duanya tidak bisa terjadi bersama-sama, harus ada “*trade off*”. Lipsey pada tahun 1960 mencoba untuk mengisi dasar teorinya. Untuk tujuan ini dia menggunakan sebagai dasar penjelasannya adalah teori pasar tenaga kerja. Dalam pasar tenaga kerja, tingkat upah cenderung turun apabila terdapat pengangguran (kelebihan penawaran tenaga kerja) dan akan naik apabila terdapat kelebihan permintaan akan tenaga kerja. Pengangguran mempunyai hubungan berbalikan (hubungan negatif) dengan kelebihan permintaan akan tenaga kerja. Dengan demikian, apabila dalam pasar terdapat kelebihan penawaran, ini akan tercermin pada banyaknya orang yang (menganggur) mencari pekerjaan. Namun demikian Lipsey mengakui adanya kenyataan bahwa pasar tenaga kerja secara nasional itu tidak sempurna. Artinya, meskipun total penawaran sama dengan penerimaan akan tenaga namun mesti masih ada pengangguran. Inilah yang disebut “*Frictional/natural*” *unemployment* (Nopirin, 2009).

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang dialami oleh anggota masyarakat yang kurang beruntung di sebabkan berbabagi hal baik dari diri pribadi marupun dari faktor luar individu yang mengakibatkan mereka tidak berdaya dan tidak mampu untuk mengakses sistem sumber yang ada di sekitarnya (Bambang Rustanto, 2015). Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, tingkat investasi, pengangguran, tingkat

inflasi, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, dan lingkungan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan terjadi karena ketidak seimbangan ekonomi di masyarakat hal ini menjadi salah satu kendala untuk perkembangan ekonomi dan menjadi pusat perhatian negara, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembagunan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar negara, tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung resiko dan ketidakpastian masa depan perekonomian dunia (Mudrajad Kuncoro, 2006).

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang begitu nyata dan dekat. Bahkan, masalah ketenagakerjaan dapat menimbulkan masalah-masalah baru di bidang ekonomi maupun non ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan rendahnya pendapatan yang selanjutnya memicu munculnya kemiskinan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, maka akan menimbulkan efek yang buruk juga kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek ekonomi dalam jangka panjang (Sukirno, 2002).

Kemiskinan menjadi sebab perlambatan perkembangan Negara disebabkan beberapa faktor yang bersangkutan antara lain pertumbuhan ekonomi, pengangguran, upah minimum, dan inflasi, oleh karena itu dalam upaya mengentas kemiskinan secara terpadu.

**Tabel 1-1**  
**Jumlah Penduduk Miskin (JPM) periode 2011-2015 di Provinsi Jawa Tengah**

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Kab. Cilacap	281,950	265,685	255,749	239,750	243,470
Kab. Banyumas	328,510	309,777	296,807	283,480	285,850
Kab. Purbalingga	196,000	184,907	181,141	176,040	176,490
Kab. Banjarnegara	177,313	167,030	166,823	159,480	165,360
Kab. Kebumen	279,415	262,810	251,129	242,310	241,940
Kab. Purworejo	121,941	114,786	108,995	102,110	101,250
Kab. Wonosobo	182,951	172,376	170,127	165,830	166,410
Kab. Magelang	179,581	169,389	171,022	160,480	162,380
Kab. Boyolali	139,516	131,455	126,466	118,580	119,970
Kab. Klaten	203,052	191,285	179,480	168,180	172,300
Kab. Sukoharjo	91,966	85,675	84,054	78,850	79,940
Kab. Wonogiri	146,372	137,863	132,196	123,850	122,980
Kab. Karanganyar	124,493	117,363	114,394	107,290	106,430
Kab. Sragen	154,260	145,316	139,040	130,280	130,420
Kab. Grobogan	227,778	214,617	198,967	186,530	184,490
Kab. Blora	134,931	127,059	123,755	115,980	115,050
Kab. Rembang	140,377	132,370	127,984	119,990	119,110
Kab. Pati	175,124	164,987	157,904	148,050	147,050
Kab. Kudus	73,591	69,332	70,081	65,800	64,100
Kab. Jepara	113,349	106,980	106,853	100,480	100,610
Kab. Demak	192,465	181,591	172,465	161,950	160,890
Kab. Semarang	95,994	90,625	83,195	79,760	81,250
Kab. Temanggung	94,923	89,489	91,120	85,530	87,450
Kab. Kendal	128,584	121,241	117,748	110,480	109,270
Kab. Batang	95,306	89,811	87,493	82,120	83,530
Kab. Pekalongan	125,941	118,609	116,549	109,270	112,070
Kab. Pemalang	261,197	245,907	246,790	236,980	235,530
Kab. Tegal	161,116	151,663	149,772	140,310	143,540
Kab. Brebes	394,417	371,362	367,905	355,120	352,010

Kota Magelang	13,093	12,323	11,763	11,020	10,920
Kota Surakarta	64,498	60,745	59,679	55,920	55,710
Kota Salatiga	13,307	12,558	11,473	10,790	10,620
Kota Semarang	88,453	83,346	86,734	84,680	84,270
Kota Pekalongan	28,278	27,331	24,095	23,620	24,060
Kota Tegal	25,922	24,393	21,596	20,940	20,310

Sumber: BPS Jawa Tengah

Dalam memahami masalah jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, perlu diperhatikan juga kondisi kemiskinan yang ada di masing-masing daerah, yaitu jumlah penduduk miskin yang ada pada masing-masing kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Pada Tabel I.1 menunjukkan bahwa terdapat beberapa daerah di Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi diantara Kabupaten Brebes pada periode tahun 2011 memiliki jumlah penduduk miskin 394,4 ribu orang dan mengalami penurunan menjadi 371,4 ribu orang pada tahun 2012. Pada tahun 2013 memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 367,9 ribu jiwa dan kemudian menurun menjadi sebanyak 355,1 ribu orang pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin 352,0 ribu. kemudian diikuti oleh kabupaten Banyumas yang memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 328,5 ribu orang pada tahun 2011 dan mengalami penurunan menjadi 309,8 ribu orang pada tahun 2012. Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebanyak 296,80 ribu orang dan juga mengalami penurunan pada Tahun 2014 menjadi sebanyak 283,48 ribu orang, Sedangkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan penduduk miskin mencapai angka 285,850 ribu. Selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Cilacap yang memiliki penduduk miskin sebanyak 281,95 ribu orang pada Tahun 2011 dan mengalami penurunan menjadi 265,70 ribu orang pada tahun 2012. Pada Tahun 2013

sebanyak 255,70 ribu orang dan terjadi penurunan yang menjadi sebanyak 239,75 ribu orang pada Tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 243,470 ribu jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Walaupun mengalami penurunan tetapi angka penduduk miskin masih tinggi karena belum meratanya hasil usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan ke seluruh Kabupaten/Kota menjadi penyebabnya, padahal dampak kemiskinan sangat buruk terhadap perekonomian. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan diseluruh Kabupaten/Kota, sehingga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan bagi tiap Kabupaten/Kota dalam usaha mengatasi kemiskinan.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, dkk 2008).

Upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah dilaksanakan melalui lima pilar yang disebut “*Grand Strategy*”, yaitu:

1. Perluasan kesempatan kerja, ditujukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat, dilakukan untuk mempercepat kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat dan memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar.
3. Peningkatan kapasitas, dilakukan untuk pengembangan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan.
4. Perlindungan sosial, dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.
5. Kemitraan regional, dilakukan untuk pengembangan dan menata ulang hubungan dan kerjasama lokal, regional, nasional, dan internasional guna mendukung pelaksanaan ke empat strategi diatas (Bappeda Jateng, 2007).

## **B. Rumusan Masalah**

Kemiskinan sudah lama menjadi masalah di berbagai negara, di mana tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Untuk itu diperlukan

penelitian lebih lanjut mengenai tingkat kemiskinan dan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan pada level Kabupaten/Kota, sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan pada setiap Provinsi. Dari pendapat diatas, maka penelitian ini digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015?
3. Bagaimana pengaruh upah minimum Kabupaten/Kota terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015?
4. Bagaimana pengaruh Inflasi Kabupaten/Kota terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015?
2. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015?
3. Menganalisis pengaruh upah minimum Kabupaten/Kota terhadap tingkat kemiskinan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015?



4. Menganalisis pengaruh Inflasi Kabupaten/Kota terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, baik bersifat akademis maupun praktis, yaitu :

1. Media untuk mencoba menerapkan pemahaman teoritis di bangku kuliah dalam penelitian.
2. Dapat memberikan informasi mengenai tingkat pertumbuhan ekonom, tingkat pengangguran, upah minimum, dan inflasi kabupaten/kota terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.
3. Sebagai salah satu sumber informasi untuk pemerintah daerah tentang perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
4. Sebagai bahan masukan dan referensi penelitian persoalan kemiskinan, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum kabupaten/kota, serta pihak-pihak pemerintah daerah yang berkepentingan dengan masalah ini.

#### **E. Metodologi Penelitian**

##### **1. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan jurnal-jurnal ilmiah tentang kemiskinan. Data yang diteliti meliputi data inflasi, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum kabupaten/kota, dan jumlah penduduk miskin. Jenis data yang digunakan

adalah data panel yaitu gabungan *time series* periode tahun 2011-2015 dan *cross section* yaitu 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Analisis Data Panel

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan studi yang diterapkan adalah metode analisis statistik deskriptif dan korelasi, yaitu menganalisis dan menginterpretasikan hubungan antar variabel melalui data. Alat analisis yang digunakan adalah data panel. Menganalisis data panel menggunakan program Eviews. Analisis data panel dilakukan dengan menggunakan tiga metode yaitu:

### a. Metode *Common-Constant (Pooled Ordinary Least Square/PLS)*

Metode ini yaitu teknik regresi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan cara mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Model ini hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama halnya dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)* karena menggunakan kuadrat terkecil biasa.

### b. Metode *Fixed Effect (Fixed Effect Model/FEM)*

Pada metode FEM intersep pada regresi dapat dibedakan antar daerah karena setiap individu dianggap mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam membedakan intersepnnya dapat digunakan variabel *dummy*, sehingga metode ini juga dikenal dengan model *Least Square Dummy Variable (LSDV)*. Pada metode *Fixed Effect* estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobot (*no weight*) atau *Least Square Dummy*

*Variable (LSDV)* dan dengan pembobot (*cross section weight*) atau *General Least Square (GLS)*.

c. Metode *Random Effect (Random Effect Model/REM)*.

Model data panel pendekatan ketiga yaitu model efek acak (*random effect*). Dalam model efek acak, parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan ke dalam *error*. Karena hal inilah, model efek acak juga disebut model komponen *error (error component model)*.

Dari ketiga metode tersebut pemilihan model melalui Uji Chow dan Uji Hausman. Uji Chow digunakan untuk memilih antara Metode *Common Constant (PLS)* dan Metode *Fixed Effect (FEM)*. Uji Hausman digunakan untuk memilih antara Metode *Fixed Effect (FEM)* dan Metode *Random Effect (REM)*. Model dirumuskan sebagai berikut (Winarno, 2009):

$$\log\text{JPM}_{it} = \beta_0 + \beta_1\text{PE} + \beta_2\log\text{TP}_{it} + \beta_3\log\text{UMK}_{it} + \beta_4\text{INF}_{it} + u_{it}$$

Dimana:

LogJPM	: Jumlah Penduduk Miskin (Persen)
PE	: Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
LogTP	: Tingkat Pengangguran (Persen)
LogUMK	: Upah Minimum (Persen)
INF	: Inflasi (Persen)
Log	: Logaritma berbasis
$\beta_0$	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_3$	: Koefisien regresi untuk masing-masing variabel
u	: Residual
i	: 1,2,3,.....,35 (data <i>cross section</i> Kabupaten/Kota)
t	: 1,2, dan 3 (data <i>time series</i> 2011-2015)

### **3. Uji t-Statistik (Uji Validitas Pengaruh)**

Uji statistik t pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan hipotesis.

### **4. Uji F-Statistik**

Uji F-statistik ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap variabel dependen.

### **5. Koefisien Determinasi (R-Square)**

Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodnes of fit*) digunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Nilai koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain koefisien determinasi menunjukkan variasi turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan menjelaskan tentang uraian ringkas dari materi yang dibahas pada setiap bab dengan tujuan untuk penjelasan dan ketepatan arah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika penelitian, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan landasan teori tentang kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum, dan inflasi kabupaten/kota dan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Pada bab ini juga terdapat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang dapat diambil.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang variabel dan definisi operasional penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan tentang deskripsi obyek penelitian, yaitu kondisi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, inflasi kabupaten/kota, analisis data dalam penelitian, serta interpretasi hasil penelitian.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini disampaikan kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan.